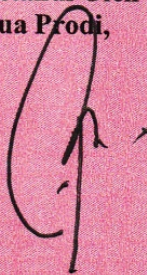


**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**  
**POTENSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)**  
**DI KOTA PADANG**

**Nama** : Novi Arni  
**Nim** : 16168  
**Program Studi** : Akuntansi (D III)  
**Fakultas** : Ekonomi

Padang, Januari 2014

Diketahui Oleh  
Ketua Prodi,



**Perengki Susanto, SE, M.Sc**  
NIP. 19810404 200501 1 002

Diketahui Oleh  
Pembimbing,



**Charoline Cheisvivy, SE, M.Ak, Ak**  
NIP. 19801019 200604 2 002



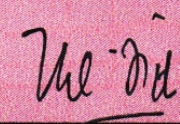
**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**POTENSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)  
DI KOTA PADANG**

**Nama** : Novi Arni  
**Nim** : 2010/16168  
**Program Studi** : Akuntansi (D III)  
**Fakultas** : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang**

**Padang, Januari 2014  
Tim Penguji**

<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. <b>Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak (Ketua)</b>	 _____
2. <b>Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak (Anggota)</b>	 _____
3. <b>Nelvirita, SE, M.Si, Ak (Anggota)</b>	 _____

## **ABSTRAK**

**Novi Arni/16168 : Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  
di Kota Padang  
Pembimbing : Charoline Cheisviyanny, SE. M.Ak. Ak**

Penelitian ini penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang berada di Kota Padang.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk observasi dan wawancara. Penulis mengumpulkan data langsung dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang (UPTD P3) dan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Sumatera Barat (DPKD).

Berdasarkan hasil yang didapat, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang (UPTD P3) pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 306.461.465.500. Namun dalam penetapan target yang dilakukan belum ditetapkan sesuai dengan potensi yang ada dilapangan melainkan masih berdasarkan realisasi penerimaan tahun lalu yang ditambah sekian persen. Tingkat Efektifitas PKB adalah sudah sangat efektif karena tingkat efektivitasnya melebihi 100%.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang”**, sebagai salah satu syarat dalam memenuhi kewajiban akhir Program Studi DIII Akuntansi di Universitas Negeri Padang.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna dan terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis dalam menyerap dan mengembangkan ilmu yang pernah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Oleh karena itu, penulis menyadari berkat adanya bantuan dan motivasi dari banyak pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Dengan segala hormat, melalui lembar ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Perengki Susanto, SE, M.Sc, selaku Ketua Pelaksana Program Studi Diploma III, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
2. Nelvirita, SE. M.Si, Ak selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

3. Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak selaku Pembimbing tugas akhir penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis
4. Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak. Ak selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
5. Orang tua, saudara dan teman-teman penulis yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Sebagai penutup, penulis berharap semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala dan karunia yang berlimpah dari Allah SWT, Amin.

Padang, Januari 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Pajak.....	7
1. Pengertian Pajak.....	7
2. Sistem Pemungutan Pajak.....	8
3. Jenis-jenis Pajak.....	9
4. Azaz-azaz Pemungutan Pajak .....	11
5. Fungsi Pajak.....	12
B. Pajak Daerah .....	13
1. Pengertian Pajak Daerah .....	13
2. Ciri-ciri Pajak Daerah .....	14
3. Prinsip Pajak Daerah.....	14
4. Unsur-unsur Pajak.....	16
C. Konsep Dasar Kendaraan Bermotor(PKB).....	17
1. Pengertian PKB.....	17
2. Objek PKB .....	17
3. Subjek PKB.....	18
4. Wajib PKB .....	18
5. Cara Perhitungan PKB .....	18
D. Dasar Hukum Penerimaan PKB.....	20
E. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor.....	22

F. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor .....	23
---	----

**BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....24**

A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir .....	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	24
C. Rancangan Penelitian .....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Objek Penelitian.....	25
3. Sumber Data.....	25

**BAB IV PEMBAHASAN .....26**

A. Gambaran Umum.....	26
1. Sejarah DPKD Sumatera Barat .....	26
2. Tugas Pokok, Fungsi serta Visi dan Misi DPKD.....	27
a. Tugas Pokok.....	27
b. Fungsi.....	27
c. Visi dan Misi.....	28
d. Tujuan dan Sasaran .....	30
3. Dasar Hukum Berdirinya DPKD SumBar .....	31
4. Struktur Organisasi DPKD SumBar .....	33
B. Realisasi Penerimaan PKB Kota Padang .....	38
C. Efektivitas Pemungutan PKB di UPTD P3 di Padang .....	40
D. Potensi Penerimaan PKBdi UPTD P3 di Padang.....	41

**BAB V PENUTUP.....49**

A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	50

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Kontribusi PKB terhadap PAD Propinsi Sumatera Barat.
- Tabel 2. Realisasi Penerimaan PKB per Kota/Kab di Propinsi Sumatera Barat  
Tahun 2012.
- Tabel 3. Realisasi Penerimaan PKB di UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi  
di Padang.
- Tabel 4. Efektivitas Pemungutan PKB di UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi  
di Padang.
- Tabel 5. Jumlah Kendaraan Bermotor di UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi  
di Padang Tahun 2012.
- Tabel 6. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Tidak Mendaftar Ulang Pada Tahun  
2012
- Tabel 7. Perhitungan Potensi PKB UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi  
di Padang.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Kontribusi PKB terhadap PAD Propinsi Sumatera Barat (2008 s/d 2012).
2. Realisasi Penerimaan PKB di UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang.
3. Realisasi Penerimaan PKB Baru pada UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang selama Tahun 2012.
4. Realisasi Penerimaan PKB NON BA pada UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang selama Tahun 2012.
5. Kendaraan Bermotor yang Pindah Keluar dari Propinsi Sumatera Barat di UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang selama Tahun 2012.
6. Kendaraan Bermotor yang Tidak Mendaftar Ulang Menurut Jenis Tahun 2012
7. Surat Observasi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran pemerintah.

Untuk dapat mewujudkan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan keuangan, serta aparatur pemerintahannya dalam menggali dan mengelola keuangan tersebut sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Dari beberapa sumber pendapatan asli daerah di propinsi Sumatera Barat, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, ideal, dan diprioritaskan.

Kota Padang merupakan Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat yang mana letaknya sangat strategis yang mempunyai latar belakang sejarah, kondisi alam serta adat dan budaya yang merupakan potensi untuk mengembangkan Kota Padang menjadi kota maju. Kota Padang juga termasuk kota yang padat penduduk hal ini merupakan suatu potensi dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Padang.

Dilihat dari perkembangannya jumlah masyarakat yang berada di Kota Padang hampir keseluruhan memiliki kendaraan bermotor, hal ini merupakan

suatu potensi dalam pendapatan daerah. Pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor ini akan menambah penerimaan daerah, dan nantinya akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan daerah tersebut

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.34 Tahun 2000 yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan UU No. 28 th 2009 menyebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Daerah meliputi pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang memberikan sumbangan cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Perkembangan pembangunan daerah akan dikatakan baik apabila penerimaan daerah yang berasal Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) lebih besar dari pendapatan lainnya, hal ini dikarenakan daerah dapat membiayai pembangunan dan kebutuhan rumah tangganya dengan penghasilannya sendiri.

Perkembangan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Sumatera Barat**

No	Tahun	Realisasi Penerimaan		Kontribusi PKB (%)
		PAD (Rp)	PKB (Rp)	
1	2008	794.300.186.403	207.015.219.500	26,06
2	2009	739.454.680.779	231.868.053.395	31,36
3	2010	1.006.820.947.269	275.640.090.917	27,38
4	2011	1.224.414.657.998	330.312.328.813	26,98
5	2012	1.225.466.022.420	378.864.221.217	30,92
<b>RATA – RATA</b>				<b>28,54</b>

*Sumber: Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Sumatera Barat (Data Diolah)*

Dari data Tabel 1 dapat diketahui pada periode 2008 s/d 2012 kontribusi PKB terhadap PAD secara rata rata sebesar 28,54 % per tahun, Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 31,36%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 26,06%. Pada tahun 2012 kontribusi PKB terhadap PAD sebesar 30,92%, naik 3,94% dibandingkan dengan tahun 2011.

**Tabel 2.**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Per Kota/ Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012**

No	Kabupaten/ Kota	Realisasi Penerimaan
1	Padang	207.763.371.060
2	Pariaman	7.519.621.425
3	Padang Panjang	5.882.113.950
4	Bukittinggi	23.653.930.030
5	Payakumbuh	17.779.227.230
6	Lubuk Basung	7.524.998.150
7	Lubuk Sikaping	6.545.090.400
8	Painan	10.636.378.180
9	Solok	10.394.776.430
10	Sijunjung	9.697.849.025
11	Batu Sangkar	11.848.935.950
12	Sawahlunto	5.580.327.025
13	Dharmasraya	13.700.491.980
14	Solok Selatan	4.355.478.550
15	Simpang Empat	12.594.603.430
16	Sarilamak/50 Kota	9.510.915.400
17	Kab.Solok (Arosuka)	8.033.977.600
18	Kab. Pariaman	9.733.618.075
<b>JUMLAH</b>		<b>378.864.221.217</b>

*Sumber: Dinas Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat*

Berdasarkan dari Tabel 2 Realisasi Penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2012 berjumlah Rp. 378.864.221.217 merupakan hasil penerimaan dari 18 UPTD/Samsat yang tersebar pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat. Diantara 18 UPTD yang tersebar Kota Padang merupakan kota yang realisasi penerimaan PKB paling besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yaitu sebesar Rp. 207.763.371.060, hal ini disebabkan karena Kota Padang merupakan kota yang padat penduduknya, hal ini merupakan suatu potensi juga dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kota Bukittinggi, kota kedua yang mampu merealisasikan penerimaannya lebih besar yaitu sebesar Rp. 23.653.930.030.

Sedangkan Kabupaten/kota yang realisasi penerimaannya paling kecil ditempati oleh kabupaten Solok Selatan yaitu sebesar Rp. 4.355.478.550.

Besarnya penerimaan realisasi penerimaan PKB ini belum sepenuhnya dijadikan penilaian keberhasilan, karena besarnya penerimaan tersebut belum semuanya tertagih. Hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya wajib pajak yang menunggak.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk meninjau dan membahas tentang potensi pajak kendaraan bermotor di Kota Padang. Untuk itu penulis akan mengangkat judul: **“POTENSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KOTA PADANG”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penetapan target pajak belum berdasarkan potensi yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan adalah :

1. Sejauh mana efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang ?
2. Seberapa besar potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang dimiliki oleh Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Instansi

Yaitu sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang untuk meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah dalam penyempurnaan atas kekurangan yang mungkin ada.

#### 2. Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang bagaimana cara perhitungan potensi PKB yang ada di kota Padang.

tahun dengan system jemput antar tanpa kehadiran wajib pajak di kantor SAMSAT.

b. SAMSAT Keliling

Salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor yang bertempat tinggal jauh dari kantor samsat khususnya untuk permohonan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahun atau pengesahan STNK setiap tahun secara cepat dan responsive.

c. Drive Thru

Adalah pelayanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaanya berada diluar gedung kantor bersama SAMSAT dan memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan yang dikendarainya.

3. Selalu melakukan pemeriksaan fisik saat melakukan pembayaran pajak ulang, agar menghindari perubahan teknis atas kendaraan bermotor baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin.
4. Apabila wajib pajak memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama maka akan dikenakan pajak progresif.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tingkat efektivitas yang diukur dari perbandingan realisasi penerimaan dengan target PKB di UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang dari tahun 2008 sampai tahun 2012 sudah sangat efektif karena tingkat efektivitasnya melebihi dari 100%.
- b. Berdasarkan perhitungan potensi PKB yang telah dilakukan pada bab sebelumnya bahwa potensi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 306.461.465.500. Sedangkan target yang telah dilakukan oleh pihak UPTD tahun 2012 adalah sebesar Rp. 203. 351. 590. 900. Maka dapat disimpulkan bahwa pihak UPTD masih jauh sekali dalam menetapkan target pajak dari potensi yang ada dilapangan.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Sebaiknya pihak Dinas Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat, dalam menetapkan target pajak propinsi, khususnya pajak Kendaraan Bermotor , untuk setiap tahunnya perlu memperhatikan potensi yang ada dilapangan.
- b. Peneliti selanjutnya, Hasil observasi dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan baik terkait perhitungan potensi Pajak Propinsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abimayu, Anggito. 2005. *Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (online), (<http://www.depkeu.go.id>, diakses 2 Juli 2007).